

BAB II

KETENTUAN TENTANG *JARIMAH* DAN PENADAHAN

A. Ketentuan Tentang *Jarimah*

1. Pengertian dan Unsur *jarimah*

Kata "*Jinayah*" merupakan bentuk (*masdar*) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹ Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi *Jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.² Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.³ Dengan kata-kata "*Syara'*" pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *Syara'*.

¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 1.

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993, h. 1.

³ Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, manipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya. Sebagai contoh mengerjakan perbuatan yang dilarang seperti sumpah palsu, penipuan jual beli, lihat Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 249.

Dalam istilah lain kata *jarimah* disebut juga *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian *jarimah* adalah Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Imam al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁴

Sedangkan menurut kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainya. Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.⁵

Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif

⁴ *Ibid.*, h. IX.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 20.

(pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "jinayah" untuk "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja.⁶

Dari beberapa definisi *jarimah* diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut⁷:

a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)

Unsur formil adalah nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syari'at yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh

⁶ Kedua istilah tersebut memang berbeda namun memiliki esensi arti yang sama. Salah satu fuqaha yang menggunakan istilah *jarimah* untuk menyebut hukum pidana Islam adalah Imam Al-Mawardi, sedangkan salah satu fuqaha yang menggunakan istilah jinayah untuk penyebutan hukum pidana Islam adalah Abdul Qadir Audah lihat Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. ix.

⁷ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 6.

manusia seperti perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya Q.S. Al-Isra' ayat 15:

مَّنْهُدًى فَإِنَّهُ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”⁸

b. Unsur Materiil (Sifat Melawan Hukum)

Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h. 513.

lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.⁹

c. Unsur Moril (pelakunya *mukallaf*)

Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya).¹⁰Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah *mukallaf*.¹¹ Secara garis besar, *mukallaf* adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah *mukallaf* dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 28.

¹⁰ *Ibid*, h.6.

¹¹ *Mukallaf* ialah seorang muslim yang telah akil baligh (dewasa). Dalam Ushul Fiqih *mukallaf* disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangannya. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqih), Ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet-7, 2000, hal. 3. Secara fisik dan rohani, syarat *mukallaf* meliputi berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*). Sedangkan secara pengetahuan, syarat *mukallaf* meliputi pelaku sanggup memahami *nash-nash syara'* yang berisi hukum taklifi, dan merupakan orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman. Lihat dalam Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, h. 67.

bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur dan mempunyai kemampuan.

2. Macam-macam *Jarimah*

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:¹²

a. *Jarimah Hudud*

Kata hudud adalah bentuk *jama'* dari kata (حُدُود). Secara etimologi, kata (حُدُود) berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur

¹² Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 7.

atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya.¹³ Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancamkan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat,¹⁴ penjatuhan hukuman merupakan sebagian tujuan agama. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat. Sedangkan kata *حَدّ* secara terminologi adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang menurut nash syar'i telah ditetapkan keharamannya dan sekaligus hukumannya¹⁵.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri khas dari *jarimah hudud* yaitu: *pertama*, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. *Kedua*, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, Cet. I, Diterjemahkan oleh Moh. Habban Husein, Bandung: PT al-Ma'arif, 1984, h. 13. Lihat juga dalam Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005, h. 22.

¹⁴ *Ibid.*, h. 7.

¹⁵ *Ibid.*, h. 13.

Dalam hubungannya dengan hukuman *hadd*, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut: *Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepadamasyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*

Jumhur fuqaha' menetapkan macam-macam *jarimah* yang diancam dengan hukuman hudud ada tujuh macam, yaitu¹⁶: zina (الزَّنا)¹⁷, tuduhan zina (الْقَذَافُ)¹⁸, minuman keras (سُكْرُ الْخَمْرِ)¹⁹, pencurian (السَّرِقَةُ)²⁰, perampokan (الْجَرَابُفَتْطُلْطَرِيقُ)²¹, keluar dari Islam (الْرِدَّةُ)²², dan pemberontakan (بَغْيَةُ الْبَغْيِ)²³.

¹⁶ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz 1, h. 79.

¹⁷ Zina adalah hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman. Hukuman bagi pezina terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 2, hukumannya didera seratus kali bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*), dan bagi pezina yang telah menikah (*muhsan*). Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*,h. 5. Lihat juga dalam Topo Santoso, *Op. Cit.*,h.24.

¹⁸ Hukuman bagi *qazhaf* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 4, hukumannya didera delapan puluh kali

¹⁹ Hukuman bagi *minuman keras* disebutkan dalam al-Sunnah yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah telah menghukum dera peminum khamr sebanyak empat puluh kali. Lihat teungku Muhammad hasbi as shiddieqy koleksi hadis-hadis hukum cet ke-3, Semarang : PT Pustaka Rezeki Putra, 2001, h. 181.

²⁰ Hukuman bagi pencuri terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38, hukumannya adalah potong tangan.

²¹ Hukuman bagi *hirabah* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33 memberikan sejumlah kemungkinan hukuman diantaranya: Hukuman mati, penyaliban, potong tangan dan kaki secara silang dan pembuangan ke luar negeri.

²² Hukuman bagi *riddah* terdapat dalam al-Sunnah, yaitu hukuman mati. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 127.

²³ Hukuman bagi pelaku *bughah* disesuaikan dengan perbedaan kondisi tindak pidananya. Adadua, yaitu *pertama*, pertanggungjawaban sebelum *mughalabah* (pertempuran) digolongkan sebagai pelaku *jarimah* biasa, demikian juga setelah *mughalabah*. *Kedua*,

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Menurut bahasa kata *qishas* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya “mengikuti”, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.

Jarimah qishash diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*.²⁴ Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku *jarimah* dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus.²⁵

Ciri-ciri dari *jarimah qishas diyat* adalah *pertama*, hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal. *Kedua*, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishash diyat hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam

pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat mughalabah. Yang terakhir ini masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu *pertama*, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, hukumannya yaitu dibunuh, namun apabila pelakunya menyerah dan meletakkan senjata, hukumannya diganti dengan *ta'zir*, dan yang *kedua* yaitu yang tidak berkaitan dengan pemberontakan hukumannya yaitu disesuaikan dengan jenis *jarimah* yang dilakukannya. Lihat Ahmad Wardi Muslish, *Op. Cit.*, h. 116.

²⁴Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 18. Lihat juga dalam: Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, h. 531.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 8.

yaitu: pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ), pembunuhan semisengaja (الْقَتْلُ الْخَطَاءُ), pembunuhan tersalah/ tidak sengaja, (الْقَتْلُ الْخَطَاءُ), dan penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ), dan penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ شِبْهُ الْخَطَاءِ).²⁶

Dasar dari hukuman qishash dan hukuman diyat adalah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”²⁷

c. Jarimah Ta'zir

Menurut etimologi, lafadz التَّغْزِيرُ berasal dari kata: عَزَرَ yang sinonimnya mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan

²⁶ Ibid.,

²⁷ Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih, Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 52.

menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong.²⁸ Sedangkan secara terminologi, التَّعْزِيرُ didefinisikan oleh al-Mawardi adalah sebagai berikut: *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatandosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara'. Wahbah Zuhairi memberikan definisi *ta'zir* yang mirip dengan al-Mawardi adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*.

Istilah *jarimah ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifaratnya*. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Hukuman-hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan katan lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.²⁹

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Hemat penulis,

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 248.

²⁹ Rokhmadi, *Op. Cit.*, h. 56.

penguasa (hakim) berhak menentukan macam delik beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* atas meninggalkan *mandub* atau mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi kalau hal itu membawa kemashlahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan golongan maksiat tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadikan alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Maka apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman.³⁰

Menurut Abdul Qadir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu:

- 1) *Jarimah hudud* dan *qishas diyat* yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*-nya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, h. 251.

3) *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah* sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.³¹

Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.³²

3. Hukuman *Jarimah*

Adapun pengertian hukuman menurut Abdul Qodir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara', tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman adalah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.³³

Macam-macam hukuman menurut hukum pidana Islam³⁴:

³¹ Abd Qadir Awdah, *Op. Cit.*, h. 68-69

³² Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, h. 262.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, h. x.

³⁴ *Ibid.*, h. 262.

- 1) Hukuman pokok seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- 2) Hukuman pengganti yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti.
- 3) Hukuman *qishash* atau hukuman *ta'zir* sebagai ganti hukuman *hadd* atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dijalankan.
- 4) Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara sendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melauka pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qisos atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang melakukan *jarimah qadzaf*.
- 5) Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan contohnya: mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.

B. Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Penadahan

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.³⁵

³⁵ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 123.

Penadahan merupakan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang menurut Muhammad Ali, berasal dari kata tadah yang berarti menampung, menadah. Sedangkan penadah ialah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.³⁶

Menurut Prof. Satouchid Kartanegara, tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.³⁷

Dalam hal tindak pidana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP) pada pasal 480 yang berbunyi:

Ke-1: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

³⁶ Cornelius, Delik Money Loundring Perlu dibedakan dengan Penadahan, <http://hukumonline.com>, diakses pada 7 Juni 2014.

³⁷ Laminating, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 362.

Ke-2: barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.³⁸

Objek penadahan adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan suatu pelanggaran. Karena diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni³⁹:

1. Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah dicuri benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan.
2. Benda yang keberadaanya/menjadi adanya itu hasil dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu, senjata api buatan sendiri.

Disini peranan pelaku penadah terlihat, menadah atau menampung barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Penadah jelas merupakan kejahatan, dimana pelaku penadah harus dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun unsur kesalahan dalam kejahatan ini ada 2 macam, yaitu berupa kesengajaan dan culpa. Berupa kesengajaan, yakni yang diketahui

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterjemahkan oleh Moeljanto, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 141.

³⁹Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004, h. 204-205.

(benda itu berasal dari kejahatan). Sedangkan culpa, yakni patut menduga (benda itu bersal dari kejahatan).⁴⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk Undnag-Undang telah diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas⁴¹:

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:

1. Yang ia ketahui atau *war van hij weet*
2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

1. Membeli atau *kopen*
2. Menyewa atau *buren*
3. Menukar atau *inruilen* Menggadaikan atau *in pand nemen*
4. Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian atau *als geschenk aannemen*
5. Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau *uit winstbejag*
6. Menjual atau *verkopen*
7. Menyewakan atau *verhuren*
8. Menggadaikan atau *in pand given*
9. Mengangkut atau *vernoeren*
10. Menyimpan atau *bewaren*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 205.

⁴¹ *Ibid.*, h. 202.

11. Menyembunyikan atau *verbergen*

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana Penadahan seperti yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan adalah unsur yang ia ketahui atau war *van hij weet*.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dala pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau *dolus* dan unsur ketidak sengajaan atau culpa atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka dalam surat dakwaanya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwakan telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam KUHP pasal 480 angka 1.⁴²

Disamping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 angka 2 KUHP terdiri dari:

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 1. Yang ia ketahui
 2. Yang seacara patut harus dapat diduga
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 1. Barang siapa

⁴² Laminating, *Op. Cit.*, h. 369.

2. Mengambil keuntungan dari suatu benda

3. Yang diperoleh karena kejahatan

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai mengambil keuntungan dari suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika barang tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan bahkan juga jika benda itu dibudidayakan, ditenakkan dan lain-lain.

3. Bentuk-Bentuk Penadahan

Dalam rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 480, 481, dan 482 masing-masing pasal seperti yang ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk-bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Berikut bentuk-bentuk penadahan dengan membahas pasal-pasal dari KUHP tersebut.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, rumusan ini terdapat dalam ketentuan pasal 480 KUHP yang menyatakan: diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sebanyak Sembilan ratus rupiah karena penadahan.

Ke-1: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda,

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2: barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Selain jenis tindak pidana penadahan ini, ada lagi dua bentuk, yaitu⁴³:

1. Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti dimuat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut.⁴⁴

Ayat (1) barang siapa menjadikan sebagai sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat (2) yang bersalah dapat dicabut haknya dalam pasal 35b No. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 481 KUHP tidak ada perbedaan dengan rumusan tindak pidana dalam pasal 480 KUHP, akan tetapi pidana-pidana yang diancam bagi pelaku tindak

⁴³ Adami Chawazi, *Op. Cit.*, h. 210.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 206.

pidana penadahan pasal 481 KUHP lebih berat dari pidana yang diancam bagi pelaku dalam pasal 480 KUHP.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 481 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam pasal 481 KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

2. Penadahan ringan

Yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 482 KUHP yang rumusnya sebagai berikut⁴⁵:

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selama-lamanya tiga bulan dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam 364, 373, 379.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam 482 KUHP tersebut diatas itu ialah perbuatan-perbuatan:

- a. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 208.

- b. Dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 364 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut diatas kejahatan pencurian ringan, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 362 dan 363 butir 4 demikian juga diatur dalam pasal 363 butir 5 itu tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatanya terdapat suatu tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah, dipidana sebagai pencurian ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 373 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP

tersebut diatas itu ialah kejahatan penggelapan ringan yang rumusnya berbunyi sebagai berikut:

Kejahatan yang diatur dalam pasal 372 itu, jika benda yang digelapkan bukan berupa ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 379 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut diatas itu ialah kejahatan penipuan ringan yang rumusnya sebagai berikut:

Kejahatan yang diatur dalam 378 itu, jika benda yang diserahkan bukan berupa ternak dan nilai benda, utang piutang yang nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.